

**PERAN DINAS KOPERASI,PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN UKM
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penyusunan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH :
LATIPAH
NPM : 2022412**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : Latipah
NPM : 212308412
Program Studi : Administrasi Publik
: PERAN DINAS OPERASI, PERINDUSTRIAN,
Judul Skripsi : PERDAGANGAN DAN UKM DI KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing I

Siti Raudah, S.Sos., M.AP., CHCM
NUPTK. 5733766667230302

Pembimbing II

Puteri Anggraini Oktaviany, S.Sos., M.AP
NUPTK. 6360769670230353

Mengetahui



Ketua Program Studi Administarsasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos. M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal penelitian ini yang merupakan salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas segala rahmat dan hidayah yang dicurahkan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“PERAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos.,M.AP., CIQaR CIQnr selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, MA. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik beserta staf dan jajaran yang sudah mengatur seluruh jadwal seminar. Beserta seluruh dosen pengajar yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Siti Raudah, S.Sos, M.AP., CHCM, CELM. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Puteri Anggraini Oktavianty, S.Sos, M.AP. Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Kedua Orangtua Tercinta, yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, maupun materi yang didapat. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik, saran, serta bimbingan dari semua pihak agar kiranya dapat memberikan masukan bagi pengembang penulis selanjutnya. Semoga segala bantuan bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Karangka Pemikiran	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Lokasi Penelitian	17
B. Pendekatan Penelitian.....	17
C. Tipe Penelitian.....	18
D. Data dan Sumber data.....	18
E. Desain Operasional Penelitian.....	20
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Teknik Analisis Data	23
H. Uji Kredibilitas Data	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Desain Operasional	21
------------	--------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran	16
-------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di daerah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Orientasi pembangunan ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan peluang usaha, peningkatan taraf pendapatan, dan penguatan struktur ekonomi yang bersumber dari potensi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran koperasi, pengembangan UMKM, pembinaan industri kecil, serta penataan kegiatan perdagangan yang tertib dan adil. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menggerakkan sektor-sektor tersebut karena memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi sosial ekonomi dan potensi wilayahnya.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, keberadaan perangkat daerah yang menangani bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Aturan ini menjadi landasan pembentukan organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di sektor ekonomi kerakyatan. Pengaturan yang lebih rinci mengenai kedudukan, tugas, fungsi, serta uraian kerja diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dinas terkait.

Pelaksanaan urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara (Diskoperindag-UKM). Dinas ini memiliki tanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan. Peran dinas mencakup penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan, serta pengawasan pada sektor-sektor tersebut guna mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Secara teknis, Diskoperindag-UKM memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan sesuai kebijakan daerah. Selain itu, dinas juga bertugas menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM, serta memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan usaha kepada masyarakat. Dengan lingkup tugas tersebut, dinas berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus fasilitator dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Diskoperindag-UKM menjalankan sejumlah fungsi penting, seperti penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis, pembinaan serta pengembangan koperasi dan UMKM melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, dan fasilitasi pemasaran, serta pengembangan industri kecil dan menengah melalui peningkatan mutu dan promosi produk. Di samping itu, dinas juga bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar dan sarana perdagangan, pengawasan metrologi, pelayanan administrasi perizinan usaha, serta kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Diskoperindag-UKM didukung oleh 50 orang pegawai yang terdiri dari 22 laki-laki dan 28 perempuan. Aparatur ini melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan koperasi, pendampingan UMKM, pengembangan industri kecil, pengelolaan pasar, dan pengawasan perdagangan di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Diskoperindag-UKM diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dukungan regulasi daerah yang jelas, struktur organisasi yang telah ditetapkan, serta kewenangan teknis yang dimiliki memberikan dasar yang kuat bagi dinas dalam melaksanakan perannya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan peran dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun fenomena masalah yang dihadapi diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan aparatur pada Diskoperindag-UKM belum sebanding dengan luasnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, seperti pembinaan

koperasi, pendampingan UMKM, pengembangan industri kecil, serta pengawasan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keadaan ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Terbatasnya Dukungan Anggaran

Pelaksanaan berbagai program seperti pelatihan, pembinaan, fasilitasi usaha, dan pengawasan perdagangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Keterbatasan dana yang ada berdampak pada belum maksimalnya kegiatan yang mendukung pengembangan koperasi, UMKM, industri kecil, serta pengelolaan pasar dan perdagangan di daerah.

3. Tidak Adanya Petugas Pendamping di Lapangan

Ketiadaan petugas khusus yang secara rutin melakukan pendampingan langsung di lapangan menyebabkan hubungan dan koordinasi antara dinas dengan pelaku koperasi, UMKM, dan industri kecil kurang berjalan secara intensif. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pemantauan, pembinaan, serta penyampaian informasi program dinas kepada para pelaku usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana *Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Hulu*

Sungai Utara Menjalankan perannya dengan mengacu pada indikator peran menurut *Soerjono Soekanto (2012:212)*, Yaitu :

1. Pelaksanaan Kebijakan
2. Fasilitator
3. Pembinaan
4. Pengawasan
5. Pelayanan masyarakat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan fungsi kebijakan, meberikan fasilitas, Pembinaan, Pengawasan, Serta memberi layanan kepada masyarakat pada sektor koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan perannya terkait keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta belum tersedianya petugas lapangan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui serta mengaji bagaimana Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara

menjalankan Perannya sebagai pelaksana kebijakan, pemberi fasilitas, pembina, pengawas, dan pemberi pelayanan kepada masyarakat pada bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan.

2. Untuk mengetahui serta menguraikan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan perannya, terutama terkait yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan belum adanya petugas lapangan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis bagi beberapa pihak yang berkaitan. Bagi Peneliti, kajian ini dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara menjalankan perannya dalam pembinaan koperasi, pendampingan UMKM, Pengembangan industri kecil, serta pengawasan kegiatan perdagangan di daerah. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi

sumber informasi dan pengetahuan peran dinas dalam mendukung pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program yang ditujukan kepada pelaku usaha dan koperasi. Selain itu, bagi program studi Administrasi Publik, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagi Pemerintahan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan program pembinaan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Ayu Wulandari, Munawarah, dan Agus Sya'bani Arlan dari STIA Amuntai (2024) berjudul **“Kinerja Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara”** menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pegawai Diskuperindag Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Aspek yang dianalisis dalam penelitian tersebut meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, kemandirian dalam bekerja, serta efektivitas pelaksanaan pekerjaan di lingkungan dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja pegawai Diskuperindag HSU sudah berada pada kategori baik. Pegawai dinilai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas, serta mampu bekerja secara mandiri. Selain itu, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan juga dinilai cukup baik. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa dari sisi efektivitas kerja masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dinas. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian tersebut antara lain adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia

yang dimiliki dinas dibandingkan dengan banyaknya beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung kerja yang belum memadai turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Beban kerja yang tidak seimbang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, serta pelayanan yang dilakukan oleh dinas kepada masyarakat. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan penelitian yang akan dilakukan, karena sama-sama meneliti Diskuperindag Kabupaten Hulu Sungai Utara serta menyoroti permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan pelaksanaan program dinas. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penilaian kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dari sisi internal organisasi, sedangkan penelitian ini lebih diarahkan pada analisis peran dinas kepada masyarakat, khususnya dalam pembinaan koperasi, pendampingan UMKM, pengembangan industri kecil, serta pengawasan perdagangan dengan menggunakan landasan Teori Peran Soerjono Soekanto. Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu melihat bagaimana peran dinas dijalankan terhadap sasaran pelayanan di tengah keterbatasan yang ada.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khairurrahman, Agus Surya Dharma, dan Saidah Hasbiyah dari STIA Amuntai (2024) yang berjudul **“Peran**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Danau Panggang dengan (Studi Kasus Desa Darussalam dan Desa Sungai Namang)” Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta berlandaskan pada konsep peran pemerintah menurut Siagian yang meliputi fungsi sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran dinas dalam pemberdayaan kelompok usaha belum terlaksana secara optimal, yang ditunjukkan oleh terbatasnya kegiatan pendampingan, kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, belum tersedianya dukungan permodalan secara langsung, serta belum efektifnya komunikasi dan koordinasi antara dinas dengan kelompok usaha. Walaupun terdapat beberapa aspek yang dinilai cukup memadai, seperti pendekatan dari sisi legalitas dan kemampuan manajerial, kondisi tersebut belum mampu meningkatkan kapasitas serta produktivitas kelompok secara berarti. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama mengkaji peran pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar pada lokasi penelitian, objek kajian, fokus permasalahan, serta tujuan penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada penggambaran peran dinas dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berorientasi pada analisis

efektivitas atau peran program pemerintah berdasarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian saat ini, sehingga penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus penguat landasan teoritis dalam penelitian ini.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2016) diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Dalam kajian sosiologi, *Soerjono Soekanto (2012)* menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*), yang ditunjukkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi yang dimiliki. Dengan demikian, kedudukan dan peran merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya membentuk pola interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, *Merton (dalam Raho, 2007)* menyatakan bahwa peran merupakan pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari individu yang menempati status tertentu, dan kumpulan peran yang melekat pada seseorang disebut sebagai *role set*, yaitu keseluruhan hubungan sosial yang terbentuk akibat status yang dimiliki. Peran dipahami sebagai konsep perilaku yang dijalankan individu dalam suatu sistem sosial yang berfungsi menjaga keteraturan struktur sosial.

Soerjono Soekanto (2012:243) juga menegaskan bahwa peran berkaitan erat dengan norma yang melekat pada posisi seseorang dalam

masyarakat, sebagai pedoman perilaku individu dalam organisasi sosial, serta sebagai unsur penting dalam mempertahankan tatanan sosial.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) menambahkan bahwa peran berfungsi sebagai pedoman dalam proses sosialisasi, pewarisan nilai dan norma, pemersatu kelompok, serta sebagai sarana pengendalian sosial. Sementara itu, Mintzberg dalam Siswanto dan Miftah Thoha (2012) memandang peran dari perspektif manajerial yang meliputi peran sebagai tokoh (figurehead), pemimpin (leader), dan penghubung (liaison), yang menekankan pentingnya interaksi, kepemimpinan, dan hubungan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Bedasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sikap dan perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukannya, yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu sistem sosial maupun organisasi. Dalam konteks pemerintahan, peran dimaknai sebagai pelaksana fungsi kelembagaan dalam menjalankan kebijakan, memberikan fasilitas, pembinaan, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep peran dioperasional berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto (2012:212) yang disesuaikan dengan konteks pemerintahan, yaitu :

1. Peran sebagai pelaksanaan kebijakan
2. Peran sebagai fasilitator
3. Peran sebagai pembina

4. Peran sebagai pengawas
5. Peran sebagai pelayanan masyarakat

2. Pengertian Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara (Diskoperindag UKM)

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha kecil Menengah (Diskoperindag UKM) Kabupaten Hulu Sungai Utara Merupakan Salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan dibidang pemerintahan daerah, yang dimiliki kewenangan untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan. Dalam stuktur organisasi pemerintahan daerah, dinas ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara institusional, Diskoperindag UKM menjalankan fungsi perumusan kebijakan, teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat pada bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Peran dinas ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, penguatan pelaku usaha kecil dan menengah, Serta penataan aktivitas perdagangan agar berlangsung secara tertip dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam karangka pembangunan daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, fasilitas akses permodalan, pengembangan kualitas produk, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha, Dinas ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan daya saing pelaku usaha lokal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Karangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu dasar terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan menggunakan teori sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kerangka pemikiran seharusnya mudah dipahami dan harus jelas. Karangka pemikiran ini berkaitan dengan beberapa aspek Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Daerah (UU No.23/2014, UU Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian)

Ditemukan beberapa fenomena permasalahan mengenai Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya :

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, Jumlah aparatur yang dimiliki Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum sebanding dengan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan, seperti pembinaan koperasi, Pendampingan UMKM, Pengembangan industri kecil, Serta

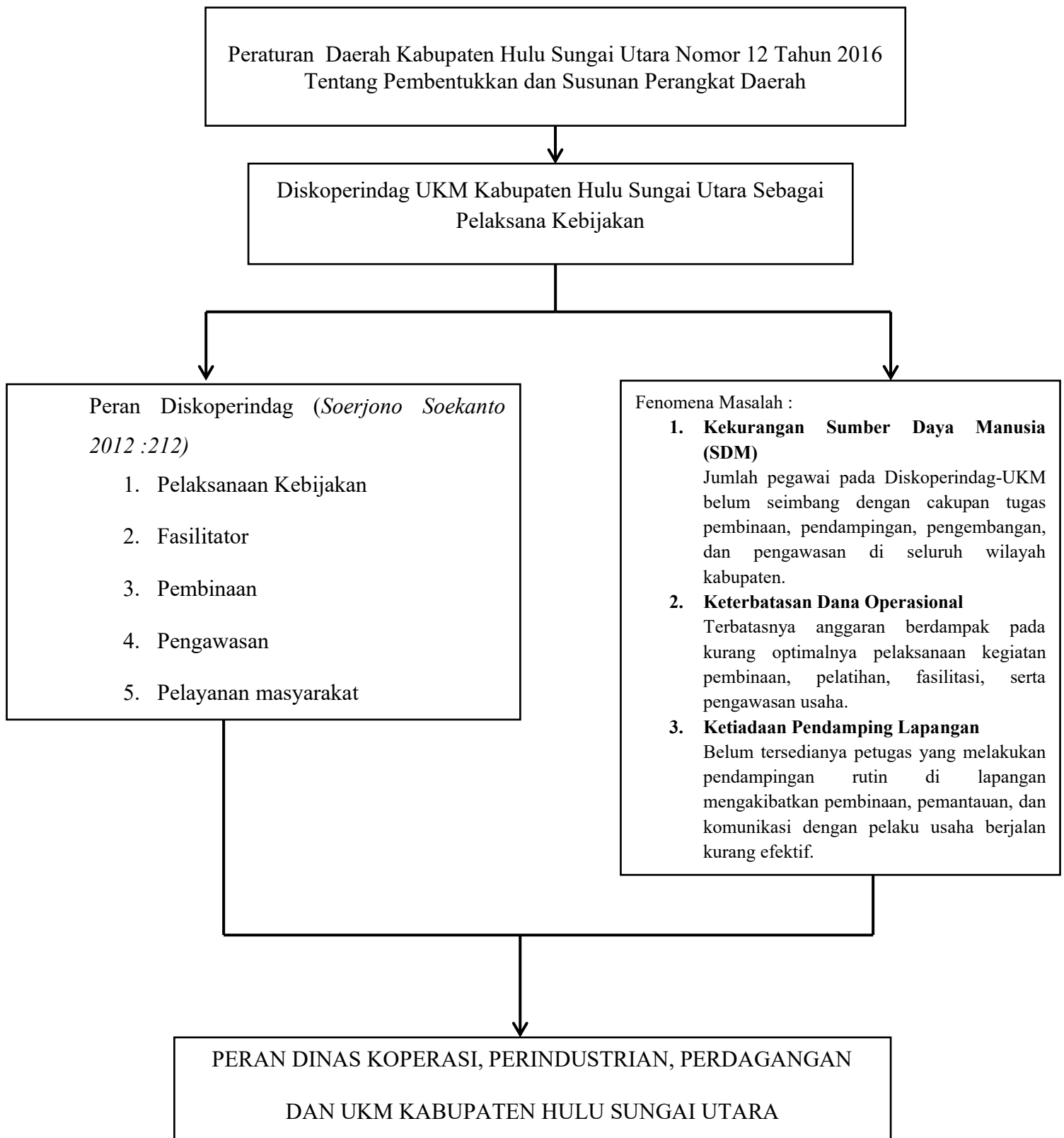
pengawasan aktivitas perdagangan. Keadaan ini menyebabkan proses pembinaan dan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan kepada seluruh sasaran.

2. Keterbatasan dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan, Alokasi anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan. Akibatnya, pelaksanaan program belum dapat menjangkau semua pelaku usaha dan koperasi secara merata.
3. Belum adanya tenaga lapangan yang ditugaskan secara khusus, Ketiadaan petugas yang fokus bekerja dilapangan untuk melakukan pemantauan, pendampingan, serta penyebaran informasi program memuat hubungan antara dinas dan pelaku usaha kurang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto (2012 : 212) bahwa pengukuran Peran secara umum dan menonjol adalah :

1. Peran Sebagai Pelaksanaan Kebijakan
2. Peran Sebagai Fasilitator
3. Peran Sebagai Pembina
4. Peran Sebagai Pengawas
5. Peran Sebagai Pelayanan Masyarakat

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dipilih ialah di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dilapangan, terutama terkait peran pemerintahan daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pendekatan Kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, proses, serta kondisi nyata di lapangan yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan melalui deskripsi secara neratif berdasarkan data dari informan dan hasil pengamatan.

Menurut Sugiyono (2022:9-10) "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, dan mengkontruksi fenomena".

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2020:18) Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka peneliti merupakan instrument utama yang menentukan kualitas penelitian dalam menterjemahkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan atau dokumen. Penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi aslinya, bahwa datanya dinyatakan pada kondisi atau keadaan sebagaimana adanya di lapangan dan selanjutnya peneliti menterjemahkan berdasarkan data di lapangan dari hasil wawancara, observasi maupun juga telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Data dan Sumber data

1. Data

Menurut Sugiyono (2018:456) Data adalah suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dan menunjang maksud dan tujuan dari penelitian yang terdiri atas :

- a. Data Primer Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil

wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

- b. Data Sekunder Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh. Sumber data dapat berupa orang, buku, dokumen dan sebagainya. Apabila penelitian dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau wawancara, sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertannyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila digunakan teknik observasi sumber datanya berupa benda, gerak, atau proses sesuatu.

Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015:85) *purposive sampling* ialah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

memungkinkan sebagai penguasa sehingga memudahkan menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti.

NO	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Dinas		1 Orang
2.	Sekretaris Dinas		1 Orang
3.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM		1 Orang
4.	Kepala Bidang Perdagangan		1 Orang
5.	Kepala Perindustrian		1Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian ini menggambarkan tahapan pelaksanaan penelitian yang disusun secara sistematis mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Desain ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai proses penelitian dalam mengkaji Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor koperasi, UMKM, industri kecil, dan perdagangan. Tahap awal penelitian dimulai dengan identifikasi masalah berdasarkan kondisi empiris di lapangan, yaitu masih adanya koperasi dan UMKM yang belum memperoleh pembinaan secara optimal, keterbatasan sumber daya aparatur dalam pengawasan dan pendampingan, serta belum maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan menjadi fokus penelitian agar penelitian lebih

terarah sesuai tujuan. Selanjutnya, ditetapkan lokasi penelitian pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara serta pelaku UMKM dan koperasi yang terkait. Penetapan lokasi didasarkan pada peran strategis dinas dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Informan meliputi aparatur dinas, pelaku UMKM, pengurus koperasi, serta pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan, observasi untuk melihat kondisi lapangan, serta dokumentasi untuk melengkapi data penelitian berupa arsip dan laporan terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan untuk menyederhanakan data, menyajikannya secara sistematis, serta menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Tabel 3. 1
Desain Operasional

Variabel	Sub variabel	Indikator
PERAN DINAS KOPERASI , PERINDUS TRIAN, PERDAGA NGAN DAN UKM	1. Peran Pembinaan	- Pelaksanaan kegiatan - Sosialisasi kebijakan
	2. Peran Fasilitas dan Pemberdayan	- Fasilitas akses
	3. Peran Pengawas	- Pengawasan terhadap Monitoring dan evaluasi.
	4. Faktor Penghambat	- Keterbatasan sumber daya manusia.

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	5. Dampak Pelaksanaan Peran	- Meningkatnya perkembangan dan kemandirian
-----------------------------	-----------------------------	---

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan semi terstruktur, Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah suatu wawancara yang dilakukan dimana orang yang diwawacarai bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung dan detail terhadap sebuah objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan atau informasi yang benar terkait dengan objek penelitian tersebut. Selanjutnya dari hasil observasi diteliti dan diamati yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan yang diterbitkan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Proses melihat kembali sumber data dan dokumen yang ada dan digunakan untuk memperluas data yang ada berupa artikel-artikel yang diterbitkan, jurnal dan skripsi, buku informasi, dan lainya sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu sungai Utara.

Dalam menganalisis data lapangan, yang paling utama dilakukan adalah peneliti menggunakan analisis data dan kualitatif dengan alasan untuk mengetahui secara mendetail dan mendalam mengenai Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka data yang dibutuhkan berupa panjabaran tentang apa yang diperoleh.

Setelah data disusun sesuai tema, kemudian dianalisis, dan ditafsirkan hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain oleh peneliti. Dengan kemudian teknisnya yang digunakan dalam menganalisis data penyusunan penelitian ini adalah dimulai dengan menelaah rangkuman inti untuk memperoleh kesimpulan.

Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung dengan berulang sampai tuntas. Aktivitas analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisi yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada permasalahan yang penting, dicari tema dan polanya.

Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemungutan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi sehingga mudah untuk dipahami. Penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bisa jadi ribuan halaman.

3. Penarikan kesimpulan

Pada pemikiran kesimpulan, peneliti dari awal mengumpulkan data dan mencari arti data yang dikumpulkan setelah data disajikan. Peneliti dapat memberikan makna, tafsiran, argument, membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Penarikan kesimpulan juga sebagai bagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam Sugiyono (2021), uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Perpanjangan pengamatan, artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan sebelumnya merupakan data yang sudah benar atau tidak. Jika data yang diperoleh ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga memperoleh data yang pasti akan kebenarannya. Namun, jika setelah dicek data sudah benar yang berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat berakhir.
2. Menggunakan bahan referensi, cara ini dilakukan untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Peneliti

melengkapi data dengan referensi berupa foto, buku, dokumen terdahulu, jurnal, dan skripsi terdahulu yang diambil selama penelitian.

3. Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Membercheck yang dilakukan peneliti adalah menanyakan kembali kepada narasumber data yang telah diperoleh untuk kredibilitas data.
4. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian juga meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan proposal penelitian data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
5. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara menggesek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

DAFTAR PUSTAKA

Khairurrahman, Agus Surya Dharma dan Saidah Hasbiyah. 2024. *Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Danau Panggang*. Amuntai: STIA Amuntai.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.

Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siswanto dan Miftah Thoha. 2012. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Perindustrian*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*. Jakarta.

Wulandari, Mita Ayu, Munawarah dan Agus Sya'bani Arlan. Tanpa Tahun. *Kinerja Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai: STIA Amuntai.